

I. DIKLAT TEKNIS

Diklat Teknis Administrasi Angkatan I sampai XXX

Materi

1. Struktur Organisasi dan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kejaksaan RI
2. Pembinaan karir (Per-065/A/JA/07/2007)
3. Standar minimum profesi jaksa (Per-066/A/JA/07/2007)
4. Kode Etik Pegawai Kejaksaan RI
5. Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK)
6. Administrasi Pembinaan
7. Administrasi Intelijen
8. Administrasi Pidana Umum
9. Administrasi pidana Khusus
10. Administrasi Datun
11. Administrasi Pengawasan
12. Ketentuan tentang penyelenggaraan Pengawasan
13. Program Kokurikuler
 - Senam kesegaran jasmani
 - PBB
 - Outbond
 - Ceramah umum

Metode

Ceramah, kuliah, Tanya jawab, curah pendapat (*brain storming*), penugasan, (*assignment*), dinamika kelompok.

Peserta

Peserta adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, jumlah 1500 orang dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural dan Fungsional Kejaksaan RI.

Lama Diklat

15 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Gabungan Aparat Hukum Polisi dan Jaksa

Materi

- I. Kajian Sikap dan Perilaku
 - Etika Profesi Jaksa dan Polisi
 - Kepemimpinan di alam terbuka/out word bound (out bond)
- II. Kajian Pembekalan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
 1. Azas-azas hukum pidana
 - Azas legalitas
 - Rumusan delik atau tindak pidana
 - Pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana
 - Alasan penghapusan pidana
 - Pidana dan pembedaan
 - Percobaan, penyertaan, dan perbarengan
 - Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana
 2. Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
 - Sistem Peradilan Pidana
 - Koordinasi antara polisi, Jaksa dan hakim dalam kerangka *integrated criminal of jurtie system*
 - Alat-alat bukti dan pembuktian dalam Sistem peradilan di Indonesia
 - Bantuan hukum terhadap tersangka
 - APB dan APS
 3. Bantuan Hukum
 - Hak-hak tersangka dalam proses pidana
 - Bantuan hukum terhadap tersangka
 - Trik dan strategi pembelaan terhadap tersangka
 4. Praperadilan
 - Pengertian Preperadilan
 - Tujuan dan Materi Praperadilan
 - Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan Praperadilan
 - Teknik dan strategi dalam menghadapi gugatan praperadilan
 - Putusan Praperadilan dan pelaksanaannya
 5. Kedudukan saksi dalam proses pidana
 - Pengertian saksi
 - Kedudukan saksi dalam proses pidana
 - Hak-hak dan kewajiban saksi
 - Penanganan terhadap kesaksian saksi palsu
 - Perlindungan saksi
- III. Kajian Aplikasi Penanganan Perkara
 1. Penyelidikan Perkara Tindak Pidana
 - Pengertian dan ruang lingkup penyelidikan
 - Kewajiban dan batas-batas wewenang penyelidik

- Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana
 - Tindak lanjut penanganan laporan / pengaduan masyarakat
 - Penyadapan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti permulaan
2. Penyidikan Perkara Tindak Pidana
 - Pengertian penyidikan
 - Kewajiban dan wewenang penyidik
 - Tata cara dan prosedur pemeriksaan TKP
 - Pengumpulan barang bukti
 - Penggeledahan dan bukti
 - Pemeriksaan surat dan dokumen
 - Penangkapan dan penahanan
 - Pengertian ahli
 3. Permintaan Keterangan Ahli
 - Pengertian ahli
 - Syarat-syarat dan kualifikasi saksi
 - Kedudukan ahli dalam proses pidana
 - Tata cara permintaan keterangan ahli
 - Teknik pemeriksaan ahli
 4. Persepsi Penyidik terhadap berkas perkara
 - Kelengkapan berkas perkara
 - Hal-hal yang penting dalam berkas perkara dari sudut pandang polisi
 5. Persepsi Jaksa terhadap berkas perkara
 - Kelengkapan berkas perkara
 - Pemeriksaan berkas perkara dan teknik pemberian petunjuk
 - Hal-hal yang penting dalam berkas perkara dari sudut pandang Jaksa
 6. Studi kasus perkara pidana
 - Instruktur menyampaikan kasus kepada peserta dan peserta diminta untuk membuat deteksi Tindak Pidana yang terjadi, mencari bukti untuk dapat dilimpahkan perkara tersebut ke tahap penuntutan

IV. Aplikasi

Praktek Kerja Lapangan

V. Program Kokurikuler

- Senam kesegaran jasmani
- PBB
- Outbond
- Latihan menembak dengan senapan laras panjang/pendek

V. Kajian wawasan

1. Ceramah JAM Pembinaan
2. Ceramah jam Tindak Pidana Umum

3. Ceramah Kapusdiklat
4. Ceramah Bareskrim POLRI

Metode

Metode yang dipergunakan dalam Diklat ini adalah :

1. Ceramah, kuliah, tanya jawab
2. Curah pendapat (brain storming)
3. Peran serta (role playing)
4. Studi kasus
5. Penugasan (*assignment*)
6. Presentasi dan pemaparan
7. Simulasi
8. Dinamika Kelompok.

Peserta

Peserta Diklat ini berasal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional yang telah diseleksi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan berjumlah 20 (dua puluh) orang serta Penyidik POLRI berjumlah 15 (lima belas) orang.

Fasilitator

Widyaswara Pusdiklat Kejaksaan RI, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, POLRI, Mahkamah Agung, Advokat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Pejabat dari instansi lain.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Gabungan Aparat Hukum Jaksa dan Hakim

Materi

- A. Kajian Sikap dan Perilaku
 1. Etika Profesi Jaksa dan Hakim
 2. Kepemimpinan di alam terbuka/Out Bond
- B. Kajian Pembekalan Ilmu Hukum Pidana
 1. Asas-asas Hukum Pidana
 2. Hukum Acara Pidana
 3. Sistem Peradilan di Indonesia (*Integrited Criminal Justice System*)
 4. Peradilan In Absentia dan Koneksitas
- C. Kajian Penanganan Perkara dan teknik Operasionalnya

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penanganannya
 2. Asset Tracing
 3. Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*)
 4. Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)
 5. Kepabeanan
 6. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
 7. Tindak Pidana Perbankan
 8. Persepsi Hakim terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa
 9. Persepsi Jaksa terhadap Putusan hakim
 10. Studi Kasus Perkara Pidana
- D. Program Kokurikuler :
- PBB, Out bound, Latihan menembak, Ceramah Teknis.

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah.

Peserta

Peserta diklat adalah 35 jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan yang telah ditetapkan untuk mengikuti diklat dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung, Pejabat struktural Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (220 jam pelajaran).

Diklat Tindak Pidana Umum (TP. Kehutanan)

Materi

- I. Kelompok Hukum Pidana
 1. Pendalaman Pra Penuntutan
 2. Pendalaman penuntutan
 3. Pendalaman Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 4. Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga
 5. Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
 6. Tindak Pidana kehutanan UU No. 41 Tahun 1999
 7. Tindak Pidana tentang HAKI

8. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
 9. Tindak Pidana Perbankan
 10. Tindak Pidana Dunia Maya (*Cyber Crime*)
- II. Kelompok Studi Kasus Pidana Umum
 1. Bedah Perkara Tindak Pidana KDRT
 2. Bedah Perkara Tindak Pidana Kehutanan
 3. Bedah Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
 4. Bedah Perkara Tindak Pidana Perbankan
- III. Kelompok Sikap Mental dan Perilaku Disiplin
 1. PBB
 2. Out Bound
 3. Penggunaan Senjata Api Laras Pendek/Laras Panjang
- IV. Kelompok Penunjang
 1. PKL
- V. Ceramah
 1. Ceramah Kapusdiklat
 2. Ceramah Jam Pidum

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah.

Peserta

Jumlah peserta dalam Diklat ini adalah 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas Jaksa yang berada dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (220 jam pelajaran)

Diklat DATUN

Materi

- A. Kelompok Perdata
 1. *Prudential Banking*
 2. Hukum perbankan dan permasalahannya
 3. Hukum Perdata Internasional

4. Teknik Pembuat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan Perkara Perdata dan TUN
 5. Non Litigasi
 6. Perseroan Terbatas
 7. Masalah *Class Action*, *Legal Standing*, *Citizen Law Suit* dan Acara Peradilan dalam Praktek Peradilan di Indonesia.
 8. Bedah Perkara Perdata dan TUN
- B. Kelompok Tata Usaha Negara
1. Kewenangan Dikresioner
 2. Wewenang Atribut dan Delegasi Mandat
 3. Keputusan TUN
 4. Perkembangan HAN Materiil
 5. Teknik Pembuatan kontrak/Perjanjian
 6. Peradilan Niaga dan Kepailitan
 7. Gugatan Yudicial Review dan Mahkamah Konstitusi
 8. Arbitrase
 9. Upaya Hukum Perkara Perdata (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali)
 10. Studi Kasus
- C. Program Kokurikuler :
1. Out Bond
 2. Latihan Menembak dengan laras panjang/pendek
 3. Ceramah Teknis

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah.

Peserta

Peserta diklat adalah 35 jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan yang telah ditetapkan untuk mengikuti diklat dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (220 jam pelajaran)

Diklat Bendaharawan

Materi

A. MATA PELAJARAN POKOK

1. Pengelolaan Uang Persediaan
2. Pengujian dan Pembayaran Tagihan
3. Perpajakan Bendahara pengeluaran
4. Pembukuan Bendaharaan Pengeluaran
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

B. MATA PELAJARAN PENUNJANG

1. Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
2. Etika Profesi PNS

C. CERAMAH

1. Pemberantasan Korupsi dan Penyelesaian Kerugian Negara
2. Kebijakan APBN

D. Program Kokurikuler :

1. Out Bond
2. Latihan Menembak dengan senjata laras panjang/pendek
3. PBB

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah

Peserta

Peserta diklat adalah 35 jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan yang telah ditetapkan untuk mengikuti diklat dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (220 jam pelajaran

Diklat Keamanan Dalam

Materi

- A. Pembinaan Kejuangan dan kepribadian
 - 1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Bela Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988
 - 2. PUDK
 - 3. Hak Asasi Manusia
- B. Pembinaan Ilmu pengetahuan dan Keterampilan
 - 1. Peraturan Militer dasar (PBB TUM)
 - 2. Pengetahuan P3K
 - 3. Pengamanan Swakarsa
 - 4. KAMTIBNAS
 - 5. Gerakan Perorangan
 - 6. Caraka malam
- C. Pembinaan Jasmani
 - 1. Bela Diri Militer
 - 2. Ketahanan Mars
 - 3. Lintas Medan
 - 4. Senam Praktek
- D. Program Kokurikuler :
 - 1. Out Bond
 - 2. Latihan Menembak dengan senapan laras pendek/panjang
 - 3. Ceramah Teknis

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah

Peserta

Peserta diklat adalah 35 jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan yang telah ditetapkan untuk mengikuti diklat dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (96 jam pelajaran)

DIKLAT PENGAWASAN

Materi

A. Kelompok Inti

1. Penyelenggaraan Pengawasan Umum :
 - Pengawasan Fungsional (Lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah)
 - Pengawasan Masyarakat
 2. Administrasi Bidang Pengawasan Kejaksaan republic Indonesia
 3. Fungsi Pengawasan di lingkungan JAM WAS Kejaksaan Republik Indonesia
 - a. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan tugas dan Wewenang pada Inspektur PEGASUM
 - b. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur KEPBANG
 - c. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada inspektur Intelijen
 - d. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur PIDSUS
 - e. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur Datun
 - f. Pemeriksaan berdasar pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur PIDUM.
 4. Pengawasan Melekat
 5. Mekanisme Penyelesaian laporan Pengaduan dan penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD)
 6. Pedoman Pelaksanaan APBN dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
 7. Administrasi Umum Kepegawaian
 8. Pemeriksaan IKN, PA dan PP :
 - a. Inventaris Kekayaan Negara (IKN)
 - b. Perhitungan Anggaran (PA)
 - c. Proyek pembangunan (PP)
- #### B. Kelompok Penunjang
1. Propenas/Renstra Kejaksaan RI/LAKIP
 2. Pengelolaan Kepegawaian
 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 4. Pengelolaan Perlengkapan
 5.
 - a. Studi Kasus Pengawasan Bidang PEGASUM
 - b. Studi Kasus Pengawasan Bidang PIDSUS
 - c. Studi Kasus Pengawasan Bidang DATUN
 - d. Studi kasus Pengawasan Bidang KEPBANG

- e. Studi Kasus Pengawasan Bidang INTELIJEN
- f. Studi Kasus Pengawasan Bidang PIDUM
- C. Kelompok Sikap Mental dan Perilaku Disiplin
 - 1. PBB
 - 2. Out Bond
 - 3. Latihan menembak dengan senapan laras panjang/pendek
- D. Ceramah
 - 1. Jaksa Agung Muda Pengawasan
 - 2. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan

Metode

Metode yang digunakan adalah Kuliah tatap muka, Tanya jawab, pendalaman materi, diskusi dan ceramah, Bedah Kasus

Peserta

Peserta diklat adalah 35 jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan yang telah ditetapkan untuk mengikuti diklat dan diasramakan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural bidang pengawasan serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

35 hari (220 jam pelajaran)

Diklat Tindak Pidana Khusus Angkatan I dan I.

Materi

- A. Kelompok Tindak Pidana Khusus
 - 1. Tupoksi Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Khusus
 - 2. Teknik Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Khusus
 - 3. Pemberkasian Perkara Tindak pidana Khusus
 - 4. Teknik Pemaparan Perkara Tindak Pidana Khusus
 - 5. Penyusunan Surat Dakwaan
 - 6. Penyusunan Pendapat JPU atas Eksepsi Penasehat Hukum
 - 7. Analisis Yurisprudensi Penting dalam Perkara Tindak Pidana Khusus
 - 8. Pengungkapan Kejahatan tindak Pidana Khusus yang dilakukan oleh Korporasi
 - 9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus In Absentia

10. Teknik Pembuktian dan Penyusunan Requisitoir dalam Perkara Tindak Pidana Khusus
 11. Upaya Hukum, Penyusunan Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi
 12. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Tindak pidana Khusus
 13. Kewenangan menangani kasus Perbankan (DATUN) atau PIDSUS atau keduanya
 14. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus dengan mekanisme DATUN
- B. Tindak Pidana di Bidang Korupsi
1. Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 3/1971, UU No. 31/1999 dan UU No. 30/2001
 2. Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan (Studi Kasus)
 3. Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Perbankan dan Moneter (Studi Kasus)
 4. Tindak Pidana Korupsi oleh Pelaku Bisnis (Studi Kasus)
 5. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan jasa PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KEPRES No. 80 Tahun 2003
- C. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan
1. Aspek Hukum dalam UU No. 10/1995 serta Peraturan Pelaksanaannya
 2. Modus Operandi, cara pengungkapan dan analisis yurisprudensi penting dalam perkara Tindak pidana Kepabeanaan
 3. Titik rawan gagalnya penanganan perkara Kepabeanaan dan cara mengatasinya
 4. Studi Kasus Tindak pidana Kepabeanaan
- D. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
1. Aspek hukum dalam UU No. 16/2000 serta peraturan pelaksanaannya tentang TP Perpajakan
 2. Modus Operandi, cara pengungkapan dan analisis yurisprudensi penting dalam tindak pidana Perpajakan
 3. Titik rawan gagalnya penanganan perkara Tindak pidana, Perpajakan dan cara mengatasinya
 4. Studi Kasus Tindak Pidana Perpajakan
- E. Tindak Pidana HAM Berat
1. Aspek Hukum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
 2. Analisis Yurisprudensi penting dan titik rawan gagalnya penanganan Tindak Pidana HAM yang Berat
 3. Studi Kasus Tindak Pidana HAM yang Berat
- F. Tindak Pidana Perikanan
1. Aspek Hukum dalam UU No. 31/2004 tentang Tindak Pidana Perikanan

2. Modus Operandi, cara pengungkapan dan analisis Yurisprudensi penting dalam perkara Tindak Pidana Perikanan
 3. Titik rawan gagalnya penanganan Tindak Pidana perikanan
 4. Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan
- G. Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Aspek hukum dalam UU No. 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 2. Modus operandi, cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi penting dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
 3. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
- H. Kelompok Penunjang
1. Forensic Accounting
 2. Asset Tracing (Pelacakan Aset)
 3. Perkara Suap dan Tindak Pidana Korupsi
- I. Kelompok Sikap, Mental dan Perilaku Disiplin
1. PBB
 2. Out Bound
 3. Latihan menembak dengan senjata laras panjang/pendek
- J. Ceramah
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 2. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
 3. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI

Metode

Kuliah tatap muka, tanya jawab atau diskusi, pendalaman materi serta studi kasus.

Peserta

Jumlah peserta Diklat sebanyak 70 (tujuh puluh orang) orang yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan dan terdiri atas para Jaksa baik yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

65 hari (440 jam pelajaran)

Diklat Wira Intelijen Angkatan I, II dan III

Materi

- A. Kelompok Inti
 1. Peraturan Baris Berbaris (PBB)
 2. Cover/Kedok (Tingkat Lanjutan)
 3. Wawancara (Tingkat Lanjutan)
 4. Interogasi (Tingkat Lanjutan)
 5. Pengamatan dan Penggambaran (Tingkat Lanjutan)
 6. Pembentukan Jaringan Agen (Tingkat Lanjutan)
 7. Klandestin dan Hubungan Klandestin (Tingkat Lanjutan)
 8. PUS/Propaganda (Tingkat Lanjutan)
 9. Briefing dan Debriefing (Tingkat Lanjutan)
 10. Kontra Intelijen (Tingkat Lanjutan)
 11. Kepemimpinan di alam terbuka/Out Bond
- B. Fungsi Intelijen
 1. Penyelidikan
 - Rencana Penyelidikan
 - Organisasi Penyelidikan
 - Pelaksanaan Penyelidikan
 - Kendali atau Pengawasan
 2. Pengamanan
 - Sasaran Pengamanan
 - Rencana Pengamanan
 - Pengorganisasian Pengamanan
 - Pelaksanaan Pengamanan
 - Kendali/Pengawasan
 3. Penggalangan
 - Sasaran Penggalangan
 - Rencana penggalangan
 - Pengorganisasian Penggalangan
 - Kendali/Pengawasan
 4. Analisa Tugas dan sasaran
- C. Studi Intelijen Kejaksaan
 1. Kedudukan dan Peran Intelijen dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi
 2. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penegak Hukum
 3. Teknik Pembuatan Produk Intel (Telaahan Intel, Lapsus, Lapopsin, Kirka)
 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
 5. Pengawasan Orang Asing dan Cekal

6. Pengamanan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan daerah
 7. Pengamanan Keuangan Negara dari Aspek Perpajakan
 8. Pengamanan Keuangan Negara dari Aspek Perbankan
 9. Penyuluhan dan Penerangan Hukum
 10. Peranan Kejaksaan dalam PILKADA
- D. Kelompok Wawasan
1. Psikologi Massa
 2. Logika
 3. Statistik Hukum
 4. Probabilitas
 5. Current Affair/Diskusi
 6. Metode Pemecahan Masalah
 7. Menulis, berbicara (diskusi) efektif
 8. Pemaparan kondisi nasional di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (dalam konteks menumbuhkan rasa bela negara)
- E. Kelompok Persandian Negara
1. Kerahasiaan Negara
 2. Persandian negara
 3. PAM Komputer dan Internet
- F. Praktek kerja Lapangan
- G. Ceramah
1. Jaksa Agung Muda Intelijen
 2. Kepala Badan Intelijen Nasional
 3. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI

Metode

Metode yang dipergunakan dalam diklat ini adalah Kuliah tatap muka, tanya jawab, pendalaman materi serta praktek kerja lapangan.

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 105 (seratus lima) orang dan diikuti oleh para Jaksa yang telah/pernah menduduki Eselon III dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat Wira intelijen Kejaksaan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait yaitu BIN, BAIS dan Kepolisian

Lama Diklat

65 hari (440 jam pelajaran)

Diklat Intelijen Dasar Angkatan I sampai dengan IV

Materi

- I. Kelompok Dasar intelijen
 1. Peraturan Baris Berbaris
 2. Pengantar Intelijen
 3. Cover/Kedok
 4. Wawancara
 5. Interogasi
 6. Foto Intelijen
 7. Pengamatan dan penggambaran
 8. Pembentukan Jaringan Agen
 9. Pengantar Kegiatan Klandestin dan Hubungan Klandestin
 10. PUS/Propaganda
 11. Briefing dan Debriefing
 12. Kontra Intelijen
 - A. Roda Perputaran Intelijen
 - B. Penyelidikan
 - Rencana Penyelidikan
 - C. Pengamanan
 1. Pengamanan Dokumen
 2. Pengamanan Personil
 3. Pengamanan Materiil
 4. Pengamanan Kegiatan
 5. Rencana Pengamanan
 - D. Penggalangan
 1. Rencana Penggalangan
 2. Penggalangan
 - E. Analisa Tugas dan Sasaran
 1. Analisa Tugas
 2. Analisa Sasaran
 - F. Teknik Pembuatan Produk Intelijen (Telahaan intelek dan Laporan Intel)
- II. Kelompok Studi Intelijen Kejaksaan
 1. Kedudukan dan Peran Intelijen Yustisial dalam penegakan Hukum
 2. Fungsi Intelijen Kejaksaan dan penerapannya dalam masalah :

- Sosial Politik
 - Ekonomi dan Keuangan
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Intelijen Kejaksaan
 4. Media Massa dan Barang Cetak
 5. Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM)
 6. Pengawasan Orang Asing dan Cekal
 7. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
 8. Kejahatan Teroris dan Kejahatan Lintas Negara
- III. Kelompok Persandian Negara
1. Kerahasiaan Negara
 2. Persandian RI
 3. Pengamanan Komputer dan Internet
- IV. Kelompok Wawasan
1. Psikologi Massa
 2. Pengetahuan bergaul dan cara bergaul yang efektif
 3. Pemaparan kondisi nasional di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (dalam konteks menumbuhkan rasa bela negara)
- V. Praktek Kerja Lapangan
- VI. Ceramah
1. Jaksa Agung Muda Intelijen
 2. Kepala Badan Intelijen Negara
 3. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI

Metode

Metode yang digunakan dalam Diklat ini adalah Kuliah tatap muka, tanya jawab atau diskusi, pendalaman materi serta bedah kasus

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang terbagi dalam 4 (empat) angkatan. Diklat ini diikuti oleh para Jaksa yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat Intelijen Kejaksaan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait yaitu BIN, BAIS dan Kepolisian.

Lama Diklat

65 hari (440 jam pelajar)

Diklat Tindak Pidana Terorisme

Materi

A. Kelompok Dasar

1. Latar Belakang dan Modus Operandi berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme
2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme
3. Pra Penuntutan Tindak Pidana Terorisme
4. Penuntutan Tindak Pidana Terorisme
5. Operasi Intelijen Yustisial untuk mendukung penanganan Tindak Pidana Terorisme
6. Studi Kasus Tindak Pidana terorisme

B. Kelompok Wawasan

1. Pemahaman tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
2. Kimia Forensik
3. Cyber Crime

C. Ceramah

1. Ceramah Jaksa Agung Muda Intelijen
2. Ceramah Kepala Densus 88
3. Ceramah Kapusdiklat

Metode

Metode yang dipergunakan adalah :

1. Ceramah, kuliah, tanya jawab
2. Curah pendapat (brain storming)
3. Penugasan (Assignment)
4. Studi Kasus dan praktek
5. Peran serta (role playing)
6. Presentasi dan pemaparan
7. Dinamika kelompok

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Jaksa yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat Terorisme.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Materi

A. Kelompok Tindak Pidana Pencucian Uang

1. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Undang-undang TP Pencucian Uang
2. PP No. 57/2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan saksi TPPU
3. Unsur-unsur TP Pencucian Uang
4. Teknik Pengungkapan TP Pencucian Uang
5. Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TP Pencucian Uang sesuai SE No. B-689/E/EJP/12/2004
6. Asset Tracing
7. Mutual Legal Assistance (MLA)
8. Studi Kasus TP Pencucian Uang

B. Kelompok wawasan

1. Akuntansi Forensik
2. TP Perbankan

C. Ceramah

1. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
2. PPATK
3. Kapusdiklat

Metode

Metode yang digunakan dalam Diklat ini meliputi kuliah tatap muka, tanya jawab atau diskusi dan pendalaman materi.

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Jaksa yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Tindak Pidana Perikanan (Legal Fishing)

kemampuan dan keterampilan Jaksa dalam bidang Tindak Pidana Perikanan.

Materi

A. Kelompok Wawasan

1. Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Tangkap
2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan
3. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

B. Kelompok Tindak Pidana Perikanan

1. Penanganan Tindak pidana Perikanan (UU No. 31/2004 tentang Perikanan)
2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dihubungkan dengan PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
3. Tehnik Pembuatan Surat Dakwaan dan Pembuktiannya
4. Hukum Laut Internasional
5. Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
7. Upaya Hukum

C. Ceramah

1. Ceramah Kapusdiklat Kejaksaan RI
2. Ceramah Pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Ceramah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Metode

Metode yang digunakan dalam Diklat ini meliputi kuliah tatap muka, tanya jawab atau diskusi dan pendalaman materi serta bedah kasus.

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Jaksa yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Hak Atas Kekayaan Intelektual

Materi

I. Kajian Sikap dan Perilaku

1. Kepemimpinan di alam terbuka / out world bound :
 - a. Mengetahui diri sendiri
 - b. Mengetahui orang lain
 - c. Mengetahui Lingkungan
 - d. Nilai-nilai kejujuran dan kepemimpinan dalam lintas budaya
 - e. Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi

II. Kajian Dasar HAKI

1. Pengertian HAKI
 - a. Formula Internasional terhadap HAKI
 - b. Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan HAKI di Indonesia
 - c. Sekilas HAKI
 - PVT
 - Rahasia Dagang
 - Desain Industri
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - Paten
 - Merk
 - Hak Cipta
 - d. Isu-isu yang berkembang di bidang HAKI
 - Tradisional Knowledge (Pengetahuan Tradisional)
 - Benefit Sharing
 - Bio – Piracy
 - Indikasi Geografi Vs. Merk
 - e. HAKI dibenturkan dengan Budaya Hukum Tradisional

III. Kajian Haki secara umum

A. Perlindungan Varietas Tanaman

1. Pengertian PVT
2. Prinsip-prinsip PVT 29/2000
3. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman
 - Varietas tanaman yang dapat dan yang tidak dapat diberikan PVT

- Jangka waktu Subyek PVT
- Hak dan kewajiban pemegang PVT
- Tata cara mengajukan permohonan PVT
- Pemeriksaan
- Penyidikan
- Tindak Pidana

IV. Kelompok Wawasan

- A. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)
- B. Desain Industri (UU No. 31/2000)
- C. DTLST (UU No. 32/2000)
- D. Paten (UU No. 15/2001)
- E. Merk (UU No. 14/2001)
- F. Hak Cipta ((UU No. 19/2002)

V. Aplikasi

- Praktek Kerja Lapangan (PKL)

VI. Kelompok Penunjang

- Penggunaan senjata api laras pendek / laras panjang (tidak termasuk dalam jam pelajaran)

VII. Kajian Wawasan

Metode

Metode yang dipergunakan dalam Diklat ini adalah :

1. Ceramah, kuliah, tanya jawab
2. Curah pendapat (brain storming)
3. Penugasan (assignment)
4. Studi Kasus dan praktek
5. Peran serta (role playing)
6. Presentasi dan pemaparan
7. Simulasi
8. Dinamika kelompok

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Jaksa yang menduduki jabatan Struktural maupun Jaksa Fungsional serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat HAKI.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural dan Fungsional Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Protokuler

Materi

- I. Kelompok Inti
 1. Manajemen Acara
 2. Administrasi Persuratan dan koordinasi
 3. Mengelola tamu dan undangan
 4. Kesiapan diri dan Team Building
 5. Master of Ceremony
 6. Keprotokolan dan tata tertib acara
 7. Stage manajemen dan Meteri Pertunjukan
 8. Tata tempat, perlengkapan dan Peralatan
 9. Keamanan dan ketertiban
 10. Dukungan PAM wilayah
 11. Manajerial Skill
- II. Kelompok Wawasan (Out Bond)
- III. Aplikasi (PKL)
- IV. Ceramah

Metode

Metode yang dipergunakan dalam Diklat ini adalah ceramah, kuliah, tanya jawab, curah pendapat (brain storming), peran serta (role playing), dan bedah kasus.

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh Pegawai Tata Usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat dan diasramakan

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat struktural dan Fungsional Kejaksaan Republik Indonesia serta Pejabat dari Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

14 hari (96 jam pelajaran)

II. DIKLAT FUNGSIONAL

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan I sampai dengan IX

Materi

1. PBB dan TUM
2. Profil dan Etika Profesi Jaksa
3. Profesi Jaksa ditinjau dari Perspektif Agama dan Budi Pekerti
4. Kepemimpinan di alam terbuka / Out Bond
5. Emotional and Spiritual Quetion (ESQ) / Personal Develompent Program
6. Ceramah umum, ceramah khusus
7. Kajian Dasar Ilmu Hukum Pidana dan Perdata
 1. Asas-asas Hukum Pidana
 2. Jenis-jenis Tindak Pidana
 3. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana
 4. Asas-azas Hukum Perdata
8. Kajian Tugas dan Fungsi Intelijen
 1. Tugas dan Fungsi Intelijen
9. Kajian Dasar Teknis Penuntutan
 1. Administrasi Perkara Pidana
 2. Pra Penuntutan
 3. Penuntutan
 4. Upaya Hukum
 5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)
 6. Studi Kasus Perkara TP Umum
10. Kajian Tindak Pidana Korupsi
 1. Tindak Pidana Korupsi
 2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi
 3. Koordinasi Tindak Pidana Korupsi
 4. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi
11. Kajian Tugas dan Fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara
 1. Tugas dan Kewenangan JAM DATUN
 2. Administrasi DATUN
 3. Hukum Perdata Materiiil

4. Hukum Acara Perdata
5. Hukum Administrasi Negara
6. Kapita Selekta Hukum Pertanahan
7. Hukum Acara TUN
8. Upaya Hukum
9. Teknik Pembuatan Kontrak
10. Teknik Non Litigasi
11. Arbitrase
12. Kajian Penunjang Kemampuan
 1. Tindak Pidana Terorisme
 2. Tindak Pidana Bidang HAKI
 3. Tindak Pidana Kepabeanan
 4. Kedokteran Forensik
 5. Undang-undang Peradilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak
 6. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
 7. Tindak Pidana Pencucian uang
 8. Tindak Pidana Perbankan
 9. Tindak Pidana Perpajakan
 10. Hukum Laut / Tindak Pidana Perikanan
 11. Tindak Pidana Kehutanan
 12. Pasar Modal
 13. Lingkungan Hidup
 14. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 15. Pelanggaran HAM Berat
13. Keterampilan Penunjang
 1. Bahasa Inggris
 2. Komputer dan Internet
14. Aplikasi
 1. PKL
 2. Evaluasi Praktek kerja Lapangan
 3. Simulasi Perdata dan Tata Usaha Negara
 4. Praktek Simulasi Persidangan
 5. Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa Tingkat Dasar
 6. Evaluasi Penyelenggara Diklat

Metode

Kuliah tatap muka,, diskusi, pendalaman materi, bedah kasus, ceramah, kerja kelompok dan individu.

Peserta

Diklat ini ditujukan bagi calon jaksa di lingkungan Kejaksaan Agung republik Indonesia. Jumlah peserta 450 orang .

Fasilitator

Diklat ini difasilitatori oleh Widyaiswara yang berasal dari Kejaksaan dan pejabat structural Kejaksaan Agung Republik Indonesia pejabat dari intasi terkait

Lama Diklat

210 hari (1320 jam pelajaran)

211

Diklat Arsiparis

Materi

A. Kelompok Dasar

1. Pengarahan Umum dari Kapusdiklat Kejaksaan RI
2. Kebijakan Kearsipan Nasional dari kepala ANRI/Pejabat Eselon I ANRI
3. Kebijakan Kearsipan di Lingkungan Kejaksaan RI

B. Kelompok Inti

1. Pengantar Manajemen Arsip Dinamis
2. Tata Naskah Dinas dan Direktif
3. Pengurusan Surat
4. Sistem Pengelolaan Arsip Aktif
5. Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif
6. Penilaian dan Retensi Jadwal Retensi Arsip
7. Penyusutan Arsip
8. Manajemen Pusat Arsip
9. Program Arsip Vital dan Pengamanan Arsip serta Identifikasi Arsip Vital
10. Pengelolaan Arsip Elektronik berdasarkan Teknologi Informasi

C. Kelompok Wawasan

- Jabatan Fungsional Arsiparis

D. Kelompok Penunjang

Praktek Kerja Lapangan

Metode

Metode yang dipergunakan dalam Diklat Arsipari adalah :

1. Ceramah, kuliah, tanya jawab
2. Curah Pendapat (Brain Storming)

3. Penugasan (Assignment)
4. Dinamika Kelompok
5. Praktek

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi maupun Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti Diklat oleh Jaksa Agung Muda pembinaan.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Instansi lain yang terkait.

Lama Diklat

45 hari (96 jam pelajaran)

Diklat Pustakawan

Materi

- A. Kelompok Dasar
 1. Kebijakan Institusional dalam Pengembangan Perpustakaan
 2. Pengantar Ilmu Perpustakaan
- B. Kelompok Inti
 1. Pengembangan Koleksi
 2. Katalogisasi
 3. Klasifikasi dan Tajuk Subyek
 4. Layanan Perpustakaan
 5. Perawatan Bahan Perpustakaan
 6. Pengantar Teknologi Informasi
 7. Promosi Perpustakaan
 8. Praktik Kerja Perpustakaan
 9. Pembuatan Statistik di Perpustakaan
 10. Pelayanan Jasa Sirkulasi
- C. Kelompok Penunjang
 1. Studi Banding (PKL)
 2. Diskusi
 3. Evaluasi (Pre test and post test)
 4. Out Bond

D. Ceramah

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan
2. Kepala Pusat Diklat Perpustakaan
3. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI

Metode

Metode yang dipergunakan dalam Diklat ini adalah :

1. Kuliah Tatap Muka
2. Tanya Jawab atau Diskusi
3. Pendalaman Materi

Peserta

Peserta Diklat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan diikuti oleh para Tata Usaha yang menduduki jabatan Struktural pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Fasilitator

Widyaiswara dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Pejabat Perpustakaan Nasional.

Lama Diklat

45 hari (96 jam pelajaran)

